

ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI
PROVINSI JAWA BARATIndika Wulandari¹, Airlangga Surya Kusuma², Erina Putri Irwanti³, Zihane Ardhanita Diaz⁴,
Kareena Putri Pelawi⁵, Nadya Lutfiani Putri⁶indikawulan08@gmail.com, airlanggasuryak@upnvj.ac.id, putrierina40@gmail.com,
zihane48@gmail.com, kareen.pelawi@gmail.com, nadyalutfianii@gmail.com

1,2,3,4,5,6 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

This study analyzes the influence of the Human Development Index (HDI), average years of schooling, and labor force participation rate (LFPR) on the open unemployment rate in West Java Province, using panel data from 15 regencies/cities. The results indicate that the Human Development Index (HDI) and average years of schooling do not have a significant effect on open unemployment, possibly due to a mismatch between workers' skills and labor market needs. In contrast, the labor force participation rate has a significant impact, where an increase in participation without adequate job creation leads to a rise in open unemployment. These findings provide important insights for the formulation of employment and education policies in West Java.

Keywords: Human Development Index, Average Years of Schooling, Labor Force Participation Rate, Unemployment Rate, Regional Unemployment

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat menggunakan data panel dari 15 kabupaten/kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPM dan lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka, kemungkinan karena ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Sebaliknya, tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh signifikan, dimana peningkatan partisipasi tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja yang memadai menyebabkan kenaikan pengangguran terbuka. Temuan ini memberikan masukan penting bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan di Jawa Barat.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran, Pengangguran Regional

Article historyReceived: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025Plagiarism checker no 767
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pengangguran terbuka merupakan salah satu permasalahan krusial dalam pembangunan ekonomi, khususnya di daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi seperti Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menyerap angkatan kerja setiap tahunnya. Meskipun pertumbuhan ekonomi secara makro menunjukkan tren yang positif, hal tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka secara signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum inklusif dan belum menyentuh aspek pemerataan kesempatan kerja.

Masalah pengangguran terbuka tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pendapatan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, meningkatkan ketimpangan ekonomi, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Pengangguran adalah salah satu persoalan utama yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah ini dapat menjadi hambatan bagi upaya pembangunan di daerah serta memicu berbagai persoalan sosial (Raysharie et al., 2023). Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk memperhatikan faktor-faktor sosial dan struktural yang mempengaruhinya. Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menjadi tiga variabel penting yang layak dianalisis.

IPM merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Provinsi dengan IPM yang tinggi umumnya memiliki penduduk yang lebih sehat, terdidik, dan produktif. Kualitas sumber daya manusia dapat dinilai melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi nilai IPM, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas seseorang sebagai tenaga kerja. Produktivitas yang meningkat akan mendorong tumbuhnya peluang dan permintaan tenaga kerja, sehingga semakin banyak orang dapat terserap ke dalam pasar kerja, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran (Putra & Faridatussalam, 2023). Oleh karena itu, IPM diyakini memiliki hubungan erat dengan dinamika ketenagakerjaan, termasuk pengangguran terbuka. Semakin tinggi IPM suatu wilayah, diharapkan tingkat pengangguran akan menurun karena penduduknya lebih mampu beradaptasi dan bersaing di pasar kerja. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian, karena peningkatan IPM juga dapat meningkatkan ekspektasi pekerjaan, yang apabila tidak terpenuhi justru menyebabkan peningkatan pengangguran terdidik.

Di sisi lain, tingkat pendidikan memegang peran penting dalam menentukan kesiapan individu memasuki dunia kerja. Pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk soft skills yang sangat dibutuhkan di era ekonomi digital. Tingginya tingkat pendidikan suatu populasi dapat memperluas peluang kerja, tetapi juga bisa menciptakan kesenjangan antara kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja dan ketersediaan jenis pekerjaan yang sesuai, terutama jika sistem pendidikan tidak selaras dengan kebutuhan pasar. Dalam sejumlah situasi, kondisi keuangan keluarga yang tidak stabil menyulitkan akses terhadap pendidikan. Akibatnya, banyak orang, khususnya anak-anak, tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah menyelesaikan sekolah menengah atas (Pratiwi & Wijaya, 2024).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga merupakan variabel penting yang mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif mencari atau melakukan pekerjaan. TPAK yang tinggi menunjukkan potensi ekonomi yang besar, namun bila tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, justru dapat meningkatkan angka pengangguran terbuka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana interaksi antara TPAK dan ketersediaan pekerjaan mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur sejauh mana ketiga variabel tersebut memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

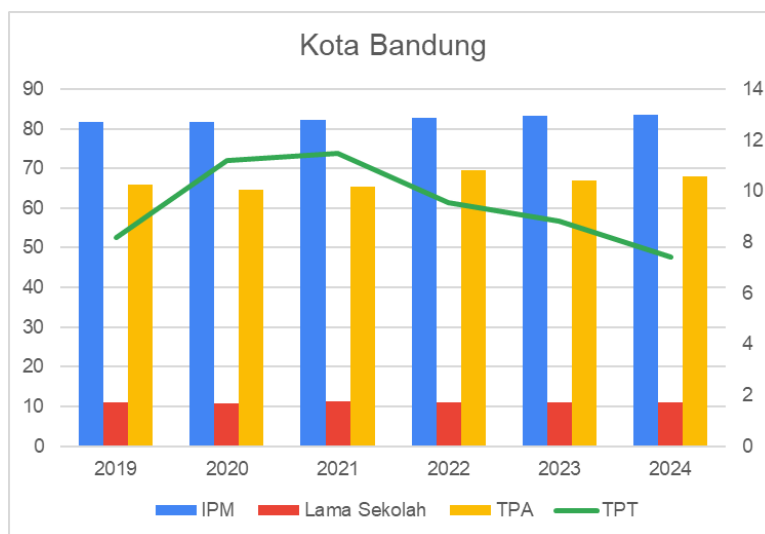
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran, khususnya di tingkat regional. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan yang lebih tepat sasaran guna menekan angka pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan teori pembangunan manusia dan ketenagakerjaan, hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bersifat negatif atau berbanding terbalik. IPM merupakan indikator komposit yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat dari tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Ketika IPM suatu wilayah meningkat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakatnya memiliki akses pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang memadai, serta penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks ketenagakerjaan, masyarakat dengan IPM tinggi cenderung memiliki keterampilan dan kompetensi yang lebih baik sehingga lebih mudah terserap oleh dunia kerja. Dengan demikian, peningkatan IPM akan menurunkan jumlah pengangguran terbuka karena tenaga kerja menjadi lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah sebagai salah satu indikator pendidikan juga memiliki hubungan negatif terhadap TPT. Secara teori, semakin lama seseorang menempuh pendidikan formal, semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Pendidikan yang lebih panjang memberikan keterampilan teknis, pemahaman konseptual, serta soft skill yang dibutuhkan dalam berbagai sektor pekerjaan. Selain itu, pendidikan yang lebih tinggi juga memperluas wawasan individu terhadap peluang kerja dan mendorong mobilitas sosial yang lebih baik. Dengan peningkatan lama sekolah, angkatan kerja menjadi lebih berkualitas dan lebih mudah bersaing di pasar kerja, sehingga angka pengangguran terbuka cenderung menurun. Oleh karena itu, peningkatan rata-rata lama sekolah di suatu daerah menjadi salah satu strategi penting dalam menurunkan TPT secara berkelanjutan.

Di sisi lain, hubungan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan TPT secara teoritis cenderung bersifat positif atau berbanding lurus. TPAK menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Ketika TPAK meningkat, berarti lebih banyak penduduk yang masuk ke pasar tenaga kerja dan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, jika peningkatan jumlah pencari kerja tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang seimbang, maka akan terjadi kelebihan suplai tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran terbuka. Dengan kata lain, meskipun TPAK yang tinggi mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam perekonomian, namun tanpa dukungan penciptaan lapangan kerja yang memadai, hal ini justru dapat meningkatkan TPT. Oleh karena itu, peningkatan TPAK harus diimbangi dengan strategi penyediaan lapangan kerja yang efektif agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pasar kerja.

Berikut merupakan Gambar Kurva dari 15 Kota di Jawa Barat:



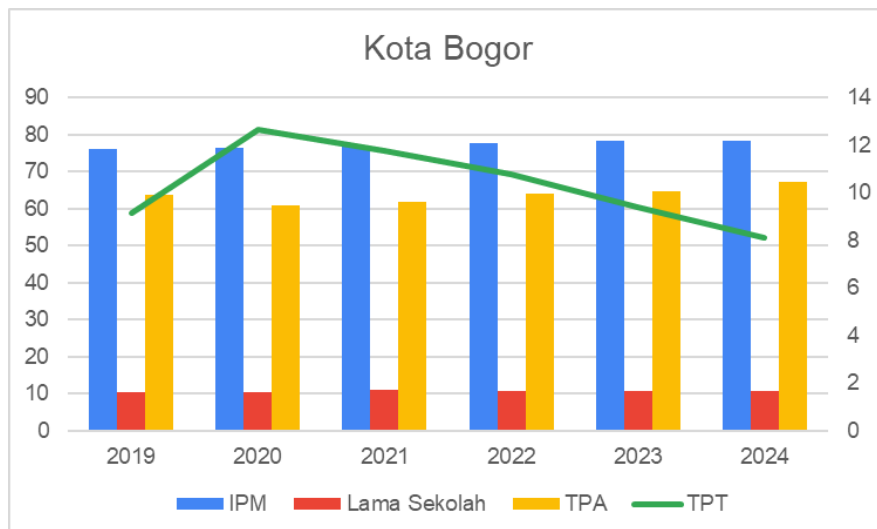
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Bandung

Berdasarkan data Kota Bandung dari tahun 2019 hingga 2024, terdapat beberapa tahun yang menunjukkan kontradiksi terhadap teori hubungan antara IPM, Lama Sekolah, dan TPAK terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada tahun 2020, meskipun IPM mengalami kenaikan dari 81,62 menjadi 81,78, justru TPT meningkat tajam dari 8,18 menjadi 11,19. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan IPM seharusnya menurunkan TPT karena kualitas sumber daya manusia meningkat. Selain itu, di tahun yang sama, Lama Sekolah menurun dan TPAK juga menurun, yang seharusnya berdampak pada turunnya TPT, tetapi justru TPT meningkat. Dengan demikian, tahun 2020 menunjukkan kontradiksi dari sisi IPM terhadap TPT.

Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi kenaikan pada IPM (81,78 menjadi 82,23) dan Lama Sekolah (10,82 menjadi 11,33), yang secara teori seharusnya menurunkan TPT. Namun, TPT justru meningkat dari 11,19 menjadi 11,46. Meskipun kenaikan TPAK dari 64,71 menjadi 65,31 sejalan dengan kenaikan TPT dan sesuai teori, tetap saja terjadi kontradiksi dari sisi IPM dan Lama Sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia tidak serta-merta menurunkan pengangguran, yang bisa jadi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dampak ekonomi makro atau pandemi COVID-19 saat itu.

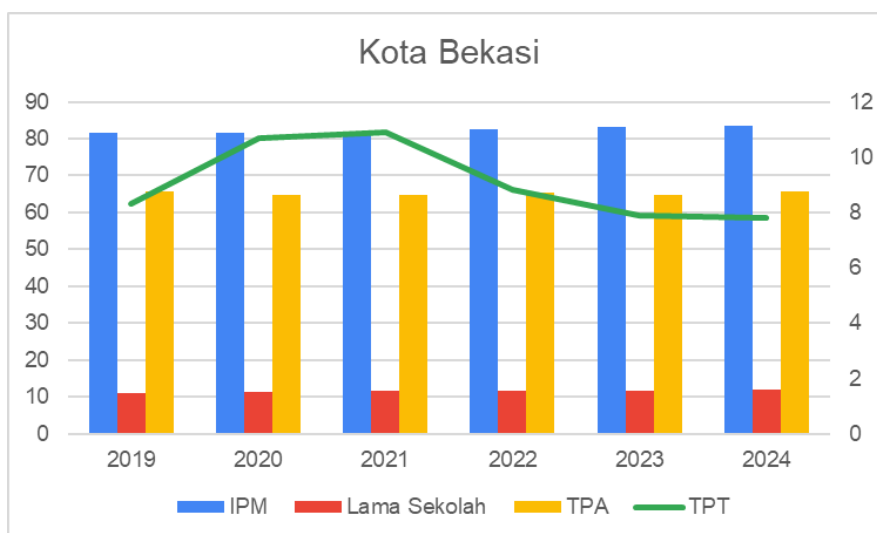
Kemudian pada tahun 2022, IPM kembali meningkat menjadi 82,75 dan TPAK mengalami lonjakan signifikan dari 65,31 menjadi 69,42. Sesuai teori, peningkatan TPAK seharusnya diikuti dengan kenaikan TPT karena semakin banyak penduduk yang masuk ke pasar kerja. Namun, TPT justru turun dari 11,46 menjadi 9,55, yang bertentangan dengan teori. Selain itu, Lama Sekolah mengalami penurunan, yang secara teori bisa memicu naiknya TPT, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu, tahun 2022 juga menunjukkan kontradiksi teori, khususnya pada variabel TPAK dan Lama Sekolah terhadap TPT. Dengan demikian, tahun 2020, 2021, dan 2022 merupakan tahun-tahun yang tidak sepenuhnya mengikuti pola teoritis dalam hubungan antara IPM, Lama Sekolah, dan TPAK terhadap tingkat pengangguran terbuka.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Bogor

Berdasarkan data Kota Bogor dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori terjadi terutama pada tahun 2020. Di tahun tersebut, IPM justru meningkat dari 76,23 menjadi 76,63, namun TPT naik tajam dari 9,16 menjadi 12,68, yang bertentangan dengan teori bahwa peningkatan IPM seharusnya menurunkan pengangguran karena peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Lama Sekolah hanya sedikit turun dan TPAK menurun cukup signifikan, yang secara teori seharusnya membuat TPT juga menurun, tetapi kenyataannya malah meningkat. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan realita di tahun 2020. Tahun-tahun lainnya cenderung mengikuti pola teori, di mana peningkatan IPM dan Lama Sekolah diiringi dengan penurunan TPT, serta kenaikan TPAK disertai peningkatan atau penurunan TPT yang masih masuk akal secara teoritis.



Sumber : Badan Pusat Statistik

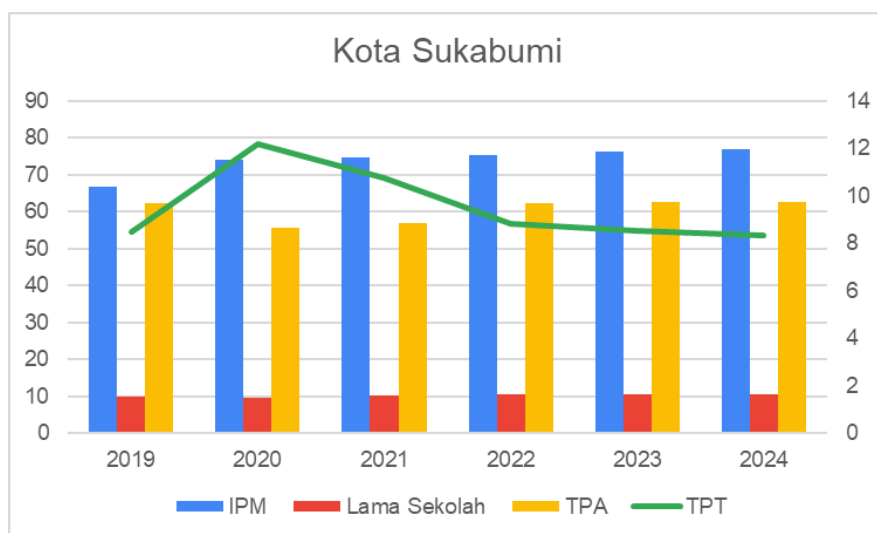
Gambar 3. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Bekasi

Berdasarkan data Kota Bekasi dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori terlihat paling jelas pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, IPM mengalami sedikit penurunan dari 81,59 menjadi 81,5, namun Lama Sekolah justru meningkat dari 11,17 menjadi 11,32. Secara teori, peningkatan lama sekolah seharusnya menurunkan TPT karena masyarakat

memiliki pendidikan yang lebih baik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, TPT meningkat cukup tajam dari 8,3 menjadi 10,68. Selain itu, TPAK turun dari 65,66 menjadi 64,74, yang secara teori seharusnya ikut menurunkan TPT, namun TPT justru meningkat. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan realita di tahun tersebut.

Kontradiksi lainnya terlihat di tahun 2021. IPM dan Lama Sekolah kembali mengalami kenaikan, yang seharusnya berdampak pada penurunan TPT. Akan tetapi, TPT justru naik dari 10,68 menjadi 10,88. Padahal, TPAK hanya naik sangat tipis dari 64,74 ke 64,76, sehingga tidak cukup signifikan untuk menjelaskan peningkatan TPT. Dengan demikian, tahun 2021 juga menunjukkan ketidaksesuaian terhadap teori, terutama karena peningkatan kualitas pendidikan dan IPM tidak diikuti dengan penurunan pengangguran.

Sementara itu, tahun 2022 hingga 2024 cenderung mengikuti teori. IPM dan Lama Sekolah terus meningkat, dan TPT secara bertahap menurun dari 10,88 di tahun 2021 menjadi 7,82 di tahun 2024. Begitu juga dengan TPAK yang relatif stabil. Artinya, dalam tiga tahun terakhir, hubungan antara variabel-variabel tersebut konsisten dengan teori bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan dapat menurunkan angka pengangguran. Maka dari itu, kontradiksi utama dalam hubungan antara IPM, Lama Sekolah, TPAK, dan TPT di Kota Bekasi terjadi pada tahun 2020 dan 2021.



Sumber : Badan Pusat Statistik

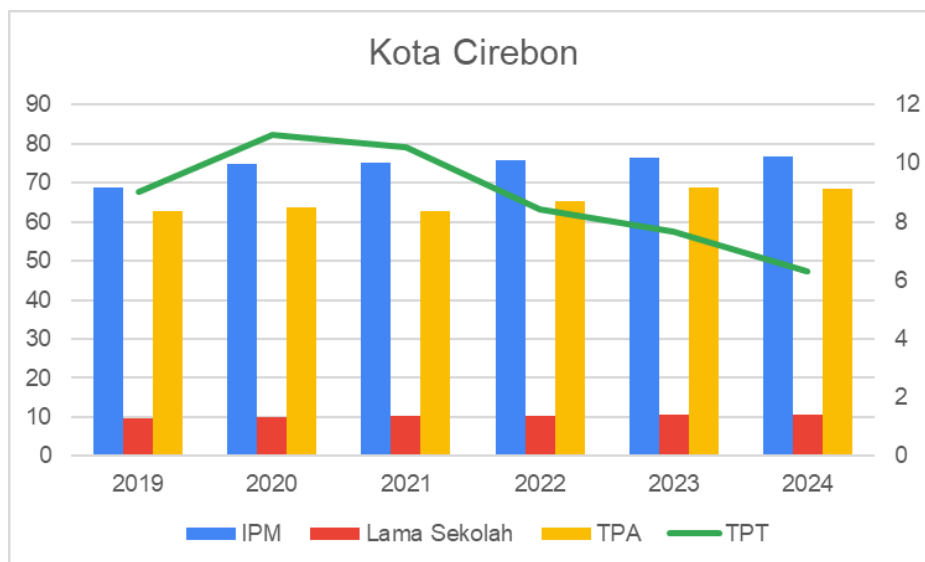
Gambar 4. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Sukabumi

Berdasarkan data Kota Bandung dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori paling menonjol terjadi pada tahun 2020. Pada tahun ini, IPM meningkat dari 81,62 menjadi 81,78, namun TPT justru naik tajam dari 8,18 menjadi 11,19. Padahal secara teori, peningkatan IPM yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia seharusnya menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, TPAK mengalami penurunan dari 65,9 ke 64,71 yang secara teori juga seharusnya membuat TPT ikut menurun. Namun kenyataannya TPT naik, sehingga tahun ini menunjukkan kontradiksi terhadap teori dari sisi IPM dan TPAK.

Kontradiksi lainnya terlihat pada tahun 2021. IPM kembali meningkat menjadi 82,23 dan Lama Sekolah juga naik signifikan dari 10,82 menjadi 11,33, yang seharusnya mendorong penurunan TPT karena meningkatnya kualitas pendidikan dan kemampuan kerja penduduk. Namun, TPT justru naik dari 11,19 menjadi 11,46. Kenaikan TPAK memang terjadi, tapi tidak terlalu besar (dari 64,71 ke 65,31), sehingga tidak cukup untuk menjelaskan peningkatan TPT yang bertolak belakang dengan teori. Oleh karena itu, tahun 2021 juga menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan realita.

Sebaliknya, pada tahun 2022 hingga 2024, data cenderung konsisten dengan teori. IPM

dan Lama Sekolah relatif stabil, TPAK mengalami fluktuasi wajar, dan TPT terus menurun dari 11,46 di tahun 2021 menjadi 7,4 di tahun 2024. Hal ini sejalan dengan teori bahwa peningkatan kualitas manusia dan pendidikan berdampak positif dalam menekan angka pengangguran. Maka dapat disimpulkan bahwa kontradiksi terhadap teori di Kota Bandung terjadi terutama pada tahun 2020 dan 2021.



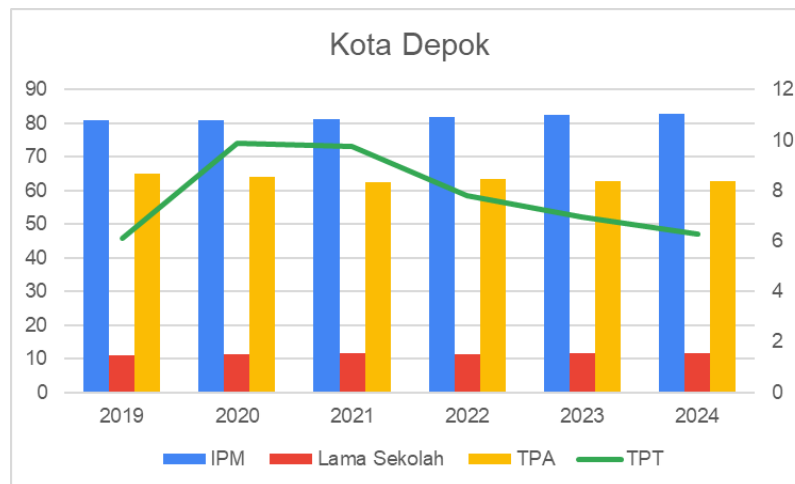
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Cirebon

Berdasarkan data Kota Cirebon dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori paling jelas terjadi pada tahun 2020. Di tahun tersebut, IPM mengalami lonjakan signifikan dari 68,69 menjadi 74,89, dan Lama Sekolah juga naik dari 9,82 menjadi 9,92. Secara teori, peningkatan IPM dan pendidikan seharusnya menurunkan TPT karena kualitas sumber daya manusia membaik. Namun, TPT justru naik dari 9,04 menjadi 10,97, yang bertentangan dengan teori. Selain itu, TPAK juga naik dari 62,71 ke 63,76, yang sesuai teori bisa mendorong kenaikan TPT, tetapi peningkatan TPT yang terjadi terlalu tinggi dibanding kenaikan TPAK, sehingga tetap mencerminkan ketidaksesuaian dengan teori secara umum.

Kontradiksi lainnya terlihat pada tahun 2021. Pada tahun ini, IPM kembali naik menjadi 75,25 dan Lama Sekolah juga meningkat menjadi 10,42. Namun, TPT hanya sedikit menurun dari 10,97 menjadi 10,53, padahal secara teori seharusnya terjadi penurunan yang lebih signifikan. TPAK bahkan menurun dari 63,76 ke 62,87, yang semestinya juga membantu menekan TPT, tetapi penurunan TPT tidak sebanding. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun indikator pendidikan dan pembangunan manusia membaik, dampaknya terhadap penurunan pengangguran tidak terlihat kuat, yang berarti terjadi ketidaksesuaian terhadap teori.

Sementara itu, mulai tahun 2022 hingga 2024, data lebih selaras dengan teori. IPM dan Lama Sekolah terus mengalami peningkatan, TPAK juga naik secara konsisten, dan TPT menurun dari 10,53 menjadi 6,29. Ini sejalan dengan teori bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi kerja yang produktif akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Maka dapat disimpulkan bahwa kontradiksi terhadap teori terjadi terutama pada tahun 2020 dan sebagian pada tahun 2021 di Kota Cirebon.



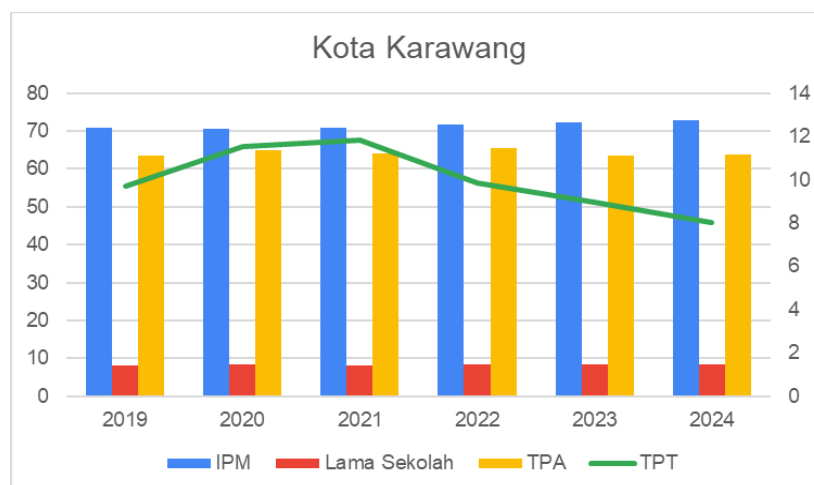
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 6. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Depok

Berdasarkan data Kota Depok dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori paling terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, IPM meningkat dari 80,82 menjadi 80,97 dan Lama Sekolah juga naik dari 10,98 menjadi 11,34, yang seharusnya secara teori berdampak pada penurunan TPT karena kualitas pendidikan dan sumber daya manusia membaik. Namun, TPT justru melonjak tajam dari 6,12 menjadi 9,87, yang bertentangan dengan teori. Selain itu, TPAK turun dari 64,96 menjadi 63,96 yang secara teori seharusnya juga menurunkan TPT, namun nyatanya TPT meningkat drastis.

Pada tahun 2021, meskipun IPM dan Lama Sekolah kembali meningkat menjadi 81,37 dan 11,50, TPT hanya sedikit turun dari 9,87 menjadi 9,76. Hal ini menunjukkan dampak perbaikan kualitas manusia dan pendidikan terhadap pengangguran tidak terlalu signifikan, yang bisa dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan teori. Selain itu, TPAK menurun lagi dari 63,96 menjadi 62,62, yang juga seharusnya mendorong penurunan TPT lebih tajam, namun nyatanya penurunan TPT sangat kecil. Dengan demikian, tahun 2021 juga menunjukkan ketidaksesuaian meskipun tidak sekuat kontradiksi yang terjadi di tahun 2020.

Mulai tahun 2022 hingga 2024, data kembali sejalan dengan teori. IPM dan Lama Sekolah terus meningkat, sementara TPT menurun secara bertahap dari 9,76 menjadi 6,27. TPAK memang berfluktuasi, namun tidak terlalu signifikan dan tidak bertentangan dengan tren penurunan pengangguran. Maka, dapat disimpulkan bahwa kontradiksi terhadap teori terjadi terutama pada tahun 2020 dan sebagian pada tahun 2021 di Kota Depok.



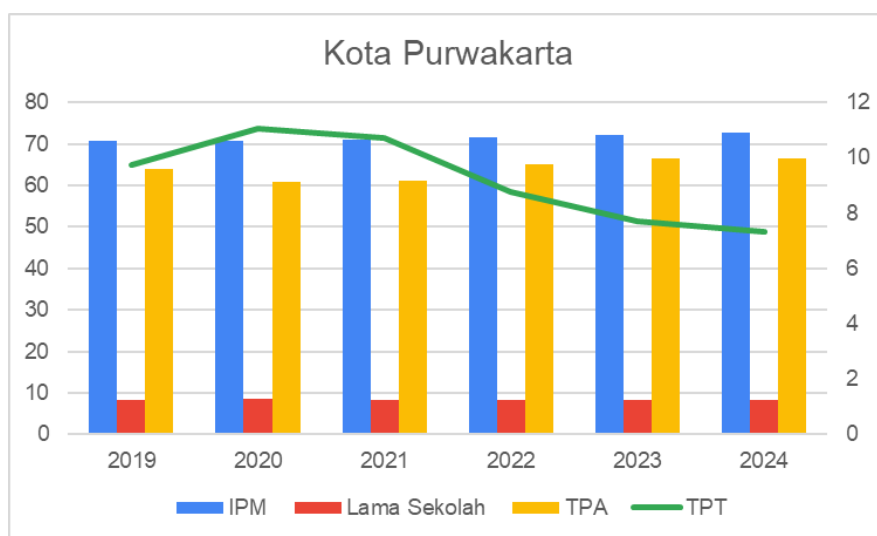
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 7. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Karawang

Berdasarkan data Kota Karawang dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori paling terlihat pada tahun 2020. Di tahun ini, TPT meningkat tajam dari 9,68 menjadi 11,52, padahal Lama Sekolah mengalami kenaikan dari 8,27 menjadi 8,35, dan TPAK juga naik dari 63,57 ke 64,9. Kenaikan TPAK memang bisa mendorong naiknya TPT sesuai teori, namun kenaikan Lama Sekolah seharusnya menurunkan TPT karena meningkatnya kualitas pendidikan. Selain itu, IPM hanya sedikit menurun dari 70,86 menjadi 70,66, yang tidak cukup besar untuk menjelaskan lonjakan TPT. Maka, kombinasi variabel di tahun ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap teori.

Kontradiksi juga muncul pada tahun 2021. Meskipun IPM naik dari 70,66 menjadi 70,94, TPT justru meningkat dari 11,52 menjadi 11,83. Selain itu, Lama Sekolah justru turun dari 8,35 menjadi 8,04, yang memang bisa menjelaskan naiknya TPT. Namun, TPAK justru turun dari 64,9 menjadi 64,19, dan sesuai teori, penurunan TPAK seharusnya membuat TPT turun, bukan naik. Karena itu, tahun 2021 menunjukkan ketidaksesuaian dari sisi IPM dan TPAK terhadap pergerakan TPT yang naik.

Mulai tahun 2022 hingga 2024, data cenderung mengikuti teori. IPM dan Lama Sekolah mengalami peningkatan setiap tahun, dan TPT menurun dari 11,83 menjadi 8,04, yang sejalan dengan teori bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan akan menekan angka pengangguran. Fluktuasi kecil pada TPAK tidak menyebabkan penyimpangan berarti. Dengan demikian, kontradiksi terhadap teori di Kota Karawang terutama terjadi pada tahun 2020 dan 2021.



Sumber : Badan Pusat Statistik

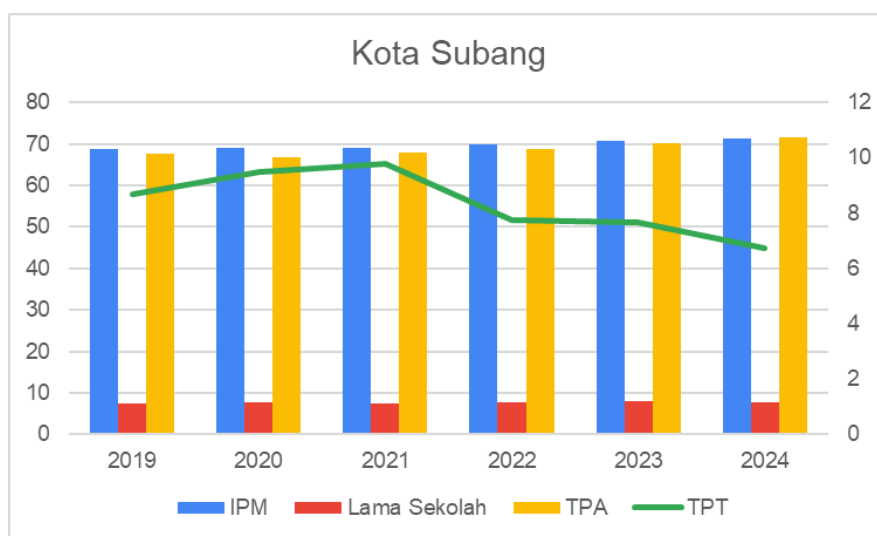
Gambar 8. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Purwakarta

Berdasarkan data Kota Purwakarta dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori paling terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, IPM naik dari 70,67 menjadi 70,82 dan Lama Sekolah juga meningkat dari 8,28 menjadi 8,52. Secara teori, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia seharusnya menurunkan TPT. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, TPT naik cukup tajam dari 9,73 menjadi 11,07. Selain itu, TPAK turun dari 63,88 menjadi 60,91, yang seharusnya ikut menekan angka pengangguran terbuka, tetapi TPT justru meningkat. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap teori dari ketiga variabel.

Tahun 2021 juga menunjukkan sedikit kontradiksi. IPM tetap mengalami kenaikan dari 70,82 menjadi 70,98, namun Lama Sekolah justru turun tipis dari 8,52 ke 8,43. TPAK juga naik sangat sedikit dari 60,91 ke 61,13. Namun, TPT hanya turun sedikit dari 11,07 menjadi 10,7, padahal dengan membaiknya IPM dan relatif stabilnya TPAK, penurunan TPT seharusnya lebih

signifikan. Dalam hal ini, respon TPT terhadap variabel-variabel pendukungnya terlihat lemah, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan teori.

Sementara itu, mulai tahun 2022 hingga 2024, tren data mulai sesuai dengan teori. IPM dan Lama Sekolah terus menunjukkan peningkatan, diikuti dengan naiknya TPAK dan turunnya TPT secara konsisten dari 10,7 menjadi 7,34. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi angkatan kerja mulai memberikan dampak positif terhadap penurunan pengangguran. Maka dapat disimpulkan bahwa kontradiksi terhadap teori terjadi terutama pada tahun 2020, dan sebagian kecil pada tahun 2021 di Kota Purwakarta.



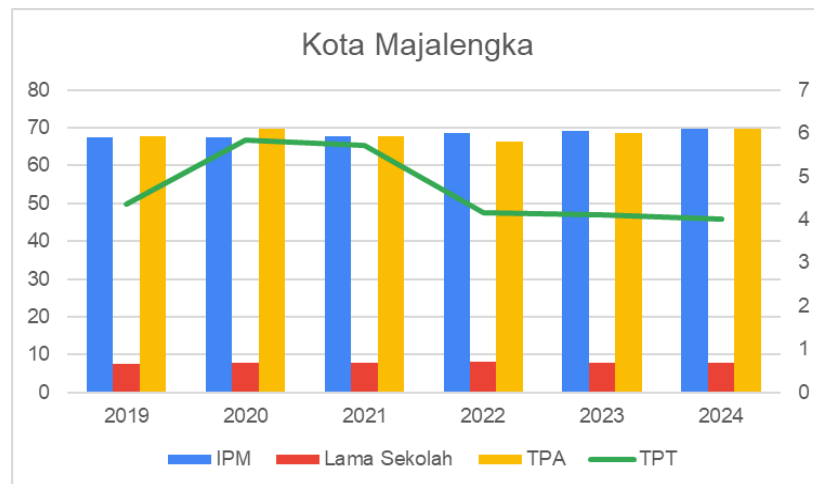
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 9. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Subang

Berdasarkan data Kota Subang dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori paling terlihat pada tahun 2021. Pada tahun tersebut, IPM mengalami kenaikan dari 68,95 menjadi 69,13 dan TPAK juga naik dari 66,7 menjadi 67,78. Secara teori, peningkatan IPM dan TPAK seharusnya berdampak pada penurunan TPT, terutama karena IPM mencerminkan peningkatan kualitas manusia. Namun, TPT justru meningkat dari 9,48 menjadi 9,77, yang bertentangan dengan teori. Selain itu, Lama Sekolah justru sedikit menurun dari 7,63 menjadi 7,57, yang memang bisa menjelaskan naiknya TPT, tetapi peningkatan IPM seharusnya tetap membantu menurunkannya.

Tahun 2020 juga menunjukkan sedikit ketidaksesuaian. IPM naik dari 68,69 ke 68,95 dan Lama Sekolah naik dari 7,34 menjadi 7,63, yang secara teori seharusnya menurunkan TPT. Namun, TPT justru meningkat dari 8,68 menjadi 9,48. Meskipun TPAK menurun dari 67,67 menjadi 66,7, yang biasanya akan menekan TPT, peningkatan TPT yang terjadi tetap menunjukkan ketidaksesuaian terhadap teori. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan di sisi pendidikan dan pembangunan manusia, dampaknya belum tampak pada penurunan pengangguran di tahun tersebut.

Mulai tahun 2022 hingga 2024, tren data kembali selaras dengan teori. IPM dan Lama Sekolah meningkat secara konsisten, TPAK juga terus naik, dan TPT menurun dari 9,77 di tahun 2021 menjadi 6,73 di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi angkatan kerja mulai berdampak positif terhadap penurunan pengangguran. Dengan demikian, kontradiksi terhadap teori di Kota Subang terjadi terutama pada tahun 2020 dan 2021.



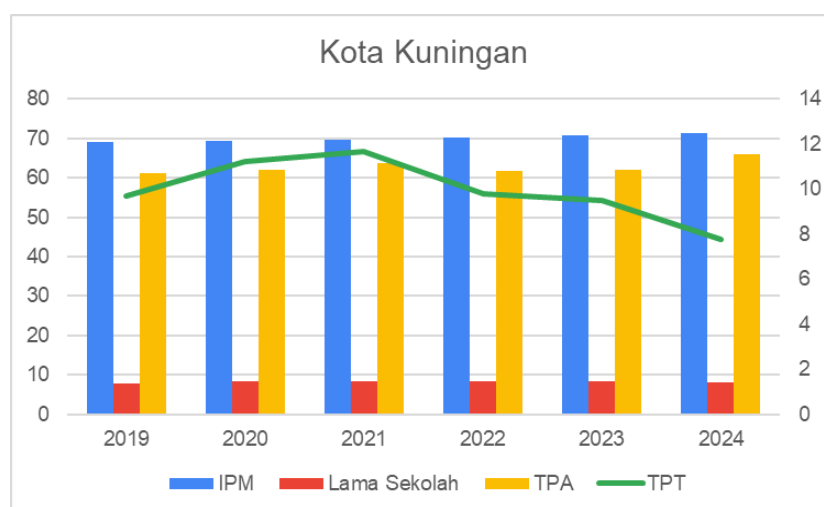
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 10. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Majalengka

Berdasarkan data Kota Majalengka dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori paling jelas terlihat pada tahun 2020. Di tahun tersebut, IPM naik dari 67,52 menjadi 67,59 dan Lama Sekolah meningkat dari 7,64 menjadi 7,99. Secara teori, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia seharusnya menurunkan TPT. Namun, TPT justru naik dari 4,37 menjadi 5,84. Meskipun TPAK juga meningkat dari 67,83 menjadi 69,66 yang sesuai teori bisa menaikkan TPT kenaikan TPT yang cukup besar tetap tidak sejalan dengan efek positif dari meningkatnya IPM dan pendidikan.

Tahun 2021 juga menunjukkan sedikit ketidaksesuaian. IPM meningkat dari 67,59 ke 67,81, dan meskipun Lama Sekolah turun sedikit dari 7,99 ke 7,84, secara umum kualitas sumber daya manusia tetap membaik. Namun, TPT hanya sedikit turun dari 5,84 ke 5,71, padahal TPAK turun cukup besar dari 69,66 ke 67,63, yang seharusnya membantu menurunkan TPT lebih signifikan. Ini menunjukkan bahwa pergerakan variabel tidak sepenuhnya sejalan dengan teori, walaupun kontradiksinya tidak sekuat tahun sebelumnya.

Mulai tahun 2022 hingga 2024, data kembali konsisten dengan teori. IPM terus meningkat, Lama Sekolah relatif stabil, dan TPT turun secara bertahap dari 5,71 menjadi 4,01. TPAK juga mengalami fluktuasi kecil namun tetap mendukung tren penurunan pengangguran. Dengan demikian, kontradiksi terhadap teori di Kota Majalengka terutama terjadi pada tahun 2020, dan sebagian pada tahun 2021.



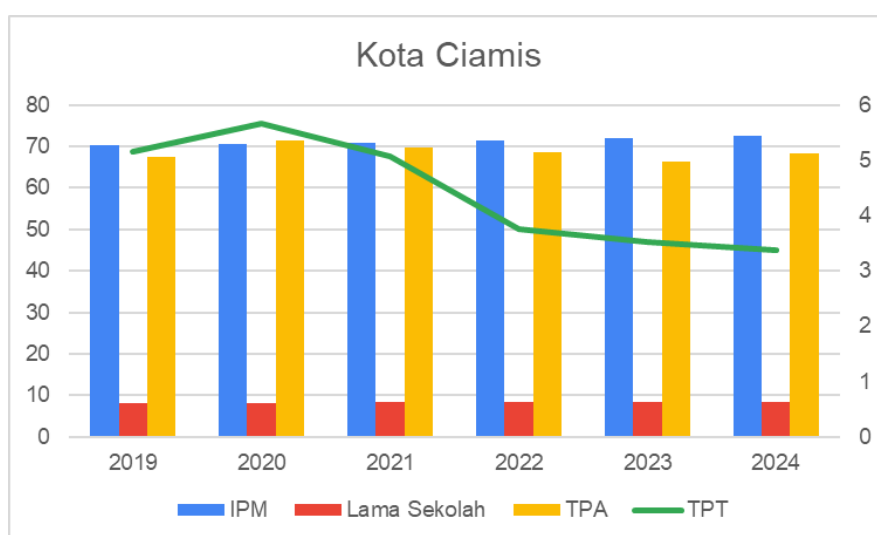
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 11. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Kuningan

Berdasarkan data Kota Kuningan dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori paling terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, IPM meningkat dari 69,12 menjadi 69,38 dan Lama Sekolah juga naik dari 7,81 menjadi 8,23. Secara teori, peningkatan IPM dan pendidikan seharusnya menurunkan TPT karena mencerminkan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Namun, TPT justru meningkat dari 9,68 menjadi 11,22. Meskipun TPAK juga naik dari 61,2 ke 61,98, yang dapat menjelaskan sebagian kenaikan TPT, lonjakan TPT tetap tidak sebanding dengan peningkatan kualitas manusia, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan teori.

Tahun 2021 juga menunjukkan ketidaksesuaian. IPM kembali naik menjadi 69,71, dan Lama Sekolah meningkat menjadi 8,26. Peningkatan ini, menurut teori, seharusnya menurunkan angka pengangguran. Namun, TPT justru kembali naik dari 11,22 menjadi 11,68. TPAK memang naik dari 61,98 menjadi 63,82, yang sesuai teori bisa menaikkan TPT karena lebih banyak orang masuk pasar kerja, tetapi peningkatan IPM dan pendidikan seharusnya dapat menekan pengangguran, bukan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, pengaruh IPM dan pendidikan tidak berjalan sesuai harapan teoritis.

Mulai tahun 2022 hingga 2024, data menunjukkan kecenderungan yang lebih sejalan dengan teori. IPM terus meningkat, dan meskipun Lama Sekolah sedikit fluktuatif, nilainya tetap tinggi secara konsisten. Sementara itu, TPT menurun dari 11,68 di tahun 2021 menjadi 7,78 di tahun 2024, seiring dengan peningkatan TPAK dan kualitas manusia. Dengan demikian, kontradiksi terhadap teori di Kota Kuningan terutama terjadi pada tahun 2020 dan 2021.



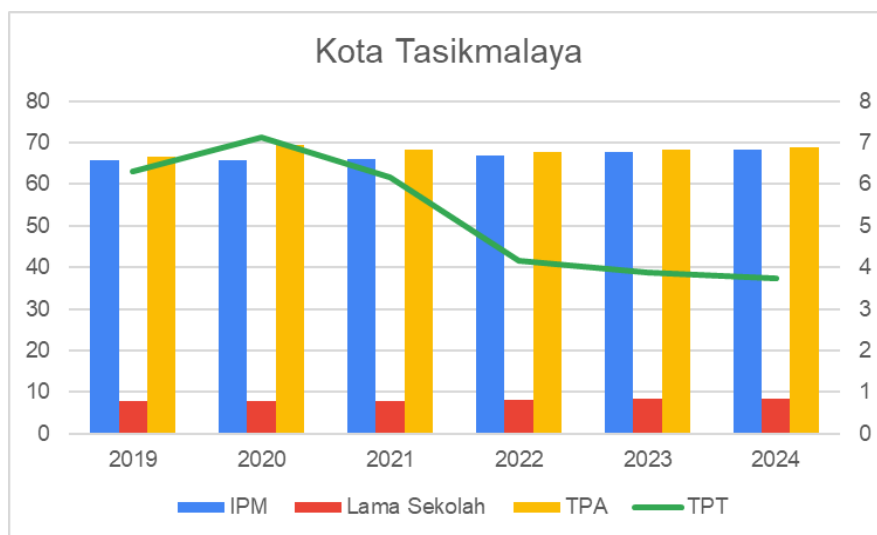
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 12. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Ciamis

Berdasarkan data Kota Ciamis dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori paling terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, IPM naik dari 70,39 menjadi 70,49 dan Lama Sekolah hanya sedikit turun dari 8,08 menjadi 8,02. Secara teori, peningkatan IPM seharusnya menurunkan TPT karena mencerminkan perbaikan kualitas hidup dan pendidikan. Namun, TPT justru meningkat dari 5,16 menjadi 5,66. Kenaikan TPAK dari 67,39 menjadi 71,41 memang bisa menjelaskan sebagian kenaikan TPT karena lebih banyak penduduk masuk ke pasar kerja, tetapi dengan IPM yang meningkat, seharusnya dampak peningkatan TPAK terhadap TPT bisa lebih diredam.

Tahun 2021 menunjukkan data yang lebih konsisten dengan teori. IPM naik menjadi 70,93, Lama Sekolah meningkat menjadi 8,28, dan TPT turun dari 5,66 ke 5,06. TPAK juga turun dari 71,41 ke 69,83, yang sejalan dengan penurunan TPT. Ini menunjukkan bahwa di tahun tersebut, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia mulai memberikan efek positif terhadap pengurangan pengangguran. Tidak ada kontradiksi berarti pada tahun ini.

Demikian pula pada tahun 2022 hingga 2024, data semakin sesuai dengan teori. IPM dan Lama Sekolah terus meningkat atau stabil di angka tinggi, sementara TPT menurun dari 5,06 di tahun 2021 menjadi 3,37 pada tahun 2024. TPAK memang mengalami penurunan dan fluktuasi kecil, namun secara keseluruhan tren penurunan TPT sejalan dengan peningkatan IPM dan pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kontradiksi terhadap teori di Kota Ciamis hanya terjadi pada tahun 2020.



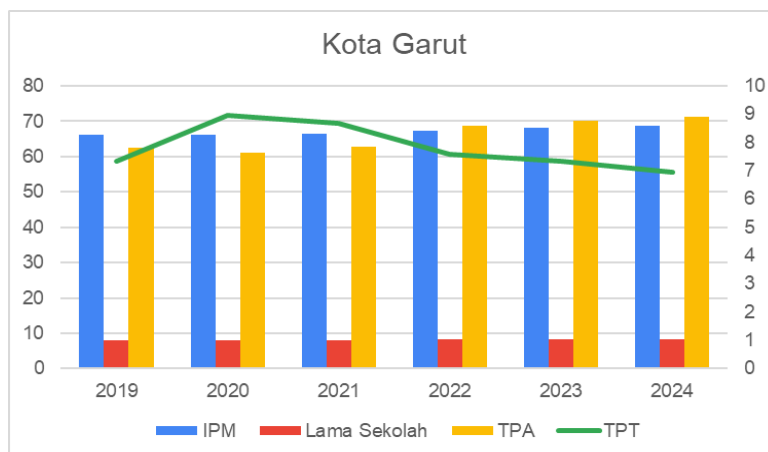
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 13. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data Kota Tasikmalaya dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori paling terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, IPM naik tipis dari 65,64 menjadi 65,67, dan Lama Sekolah juga meningkat dari 7,81 menjadi 7,94. Secara teori, peningkatan IPM dan pendidikan seharusnya mendorong penurunan TPT karena mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya—TPT naik dari 6,31 menjadi 7,12. Kenaikan TPAK dari 66,46 ke 69,54 memang bisa menyebabkan peningkatan TPT karena lebih banyak penduduk masuk pasar kerja, tetapi dengan IPM dan pendidikan yang juga meningkat, seharusnya dampaknya terhadap TPT bisa lebih teredam. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap teori.

Tahun 2021 mulai menunjukkan konsistensi dengan teori. IPM meningkat lagi menjadi 65,90, dan Lama Sekolah tetap tinggi di 7,93. TPT pun menurun dari 7,12 menjadi 6,16, sementara TPAK menurun dari 69,54 ke 68,18. Penurunan TPT ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan berkurangnya tekanan dari sisi partisipasi angkatan kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran. Meskipun belum terlalu signifikan, data tahun ini sudah lebih mendekati pola hubungan yang diharapkan secara teoritis.

Selanjutnya, dari tahun 2022 hingga 2024, tren semakin sesuai dengan teori. IPM dan Lama Sekolah terus meningkat secara konsisten, sementara TPT menurun tajam dari 6,16 pada tahun 2021 menjadi 3,37 pada tahun 2024. TPAK memang mengalami sedikit fluktuasi, namun tetap berada di angka yang stabil. Secara keseluruhan, hubungan antara ketiga variabel tersebut menunjukkan konsistensi dengan teori bahwa peningkatan IPM dan pendidikan dapat menurunkan tingkat pengangguran. Dengan demikian, kontradiksi terhadap teori di Kota Tasikmalaya hanya terjadi pada tahun 2020.



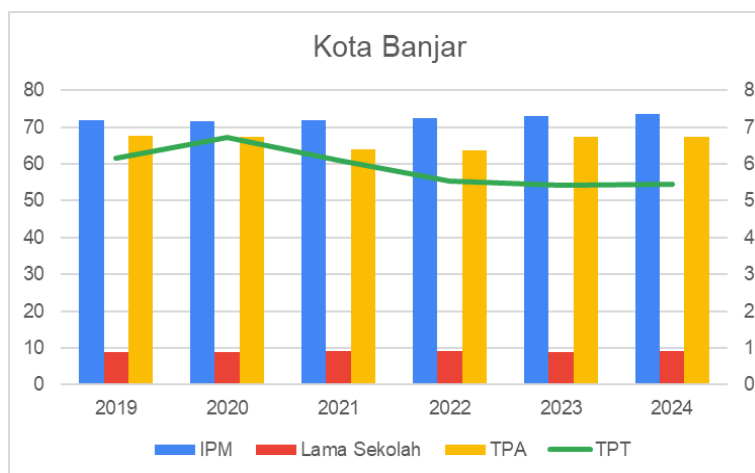
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 14. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Garut

Berdasarkan data Kota Garut dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori paling terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, IPM mengalami penurunan tipis dari 66,22 menjadi 66,12 dan Lama Sekolah juga sedikit menurun dari 8 menjadi 7,99. Secara teori, penurunan IPM dan Lama Sekolah dapat menyebabkan peningkatan TPT, yang memang terjadi dengan kenaikan TPT dari 7,35 menjadi 8,95. Namun, yang menjadi kontradiksi adalah TPAK juga menurun dari 62,6 menjadi 61,11, seharusnya penurunan TPAK cenderung menurunkan TPT, tetapi kenyataannya TPT justru naik. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara variabel-variabel tersebut dan teori.

Tahun 2021 menunjukkan pola yang masih kurang sesuai dengan teori. IPM sedikit naik menjadi 66,45, tetapi Lama Sekolah sedikit menurun lagi menjadi 7,96. TPT menurun sedikit dari 8,95 menjadi 8,68, walaupun TPAK meningkat dari 61,11 ke 62,76. Dalam konteks teori, kenaikan IPM dan penurunan Lama Sekolah seharusnya menimbulkan efek yang berlawanan pada TPT, namun fluktuasi kecil ini menunjukkan ketidakselarasan yang masih terjadi di tahun tersebut.

Mulai tahun 2022 hingga 2024, data menunjukkan tren yang lebih konsisten dengan teori. IPM dan Lama Sekolah meningkat secara bertahap, sementara TPAK juga naik, dan TPT menurun dari 7,6 pada 2022 menjadi 6,96 pada 2024. Hal ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi angkatan kerja yang baik dapat menurunkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, kontradiksi utama hanya terjadi pada tahun 2020 dan sebagian pada tahun 2021.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 15. Tingkat IPM, Lama Sekolah TPAK, dan TPT Kota Banjar

Berdasarkan data Kota Banjar dari tahun 2019 hingga 2024, kontradiksi terhadap teori terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, IPM sedikit menurun dari 71,75 menjadi 71,7 dan Lama Sekolah juga menurun tipis dari 8,86 menjadi 8,84. Menurut teori, penurunan kualitas sumber daya manusia ini seharusnya diikuti oleh kenaikan TPT, yang memang terjadi dengan meningkatnya TPT dari 6,16 menjadi 6,73. Namun, TPAK juga mengalami penurunan dari 67,59 menjadi 67,35, yang biasanya seharusnya menurunkan TPT. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara variabel dan teori pada tahun ini.

Pada tahun 2021, data kembali menunjukkan konsistensi dengan teori. IPM meningkat menjadi 71,92, Lama Sekolah naik menjadi 9,08, dan TPT turun dari 6,73 menjadi 6,09. Walaupun TPAK turun cukup signifikan dari 67,35 menjadi 64,07, penurunan TPT tetap sesuai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui IPM dan Lama Sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan pendidikan dan pembangunan manusia berpengaruh positif dalam menurunkan tingkat pengangguran.

Selama tahun 2022 hingga 2024, data menunjukkan tren yang stabil dan sesuai dengan teori. IPM dan Lama Sekolah terus meningkat atau relatif stabil, sementara TPT terus menurun dan stabil di angka rendah, sekitar 5,4 sampai 5,5. TPAK mengalami fluktuasi kecil, namun secara umum tetap cukup tinggi. Oleh karena itu, kontradiksi terhadap teori hanya muncul pada tahun 2020, sementara tahun-tahun berikutnya menunjukkan hubungan yang konsisten antara IPM, Lama Sekolah, TPAK, dan TPT sesuai teori.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pengangguran terbuka merupakan salah satu fenomena ekonomi yang kompleks dan telah menjadi fokus perhatian pemerintah selama bertahun-tahun. Menurut Sukirno (2016), pengangguran terbuka merupakan keadaan dimana seseorang tergolong dalam angkatan kerja atau berada dalam usia produktif (15-65 tahun) yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi tidak dapat memperolehnya.

Teori ekonomi John Mayer Keynes (1936) dalam *"The General Theory of Employment, Interest and Money"* memberikan pemahaman mengenai fenomena pengangguran melalui konsep permintaan agregat. Dalam teorinya ditekankan bahwa permintaan agregat merupakan faktor utama dalam penggerak perekonomian terutama pada kondisi perekonomian yang sedang mengalami situasi lesu. Argumen lainnya menyatakan bahwa dalam meningkatkan permintaan agregat dapat dilakukan dengan adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Peningkatan permintaan agregat ini dianggap mampu untuk mengurangi pengangguran serta deflasi. Berbeda dengan pandangan klasik yang meyakini bahwa pasar akan selalu mencapai *full employment* melalui mekanisme pasar, pendekatan Keynes sendiri lebih memfokuskan pada kekurangan permintaan agregat sebagai penyebab utama pengangguran *involunter*, dimana situasi seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku, namun tidak dapat menemukan pekerjaan karena keterbatasan permintaan tenaga kerja di pasar. Teori Keynes menekankan bahwa pengangguran *involunter* dapat bertahan karena kekakuan upah dan harga (Mankiw, 2019).

Konsep *multiplier effect* dalam teori Keynes juga menjelaskan bagaimana permintaan agregat mempengaruhi jumlah pengangguran. Jika permintaan agregat meningkat, maka produksi akan ikut meningkat sehingga jumlah pengangguran akan menurun. Sebaliknya jika permintaan agregat menurun, maka produksi akan ikut menurun sehingga jumlah pengangguran akan meningkat (An-Nur, 2024). Di negara berkembang sendiri, fenomena pengangguran terbuka seringkali terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja dengan kebutuhan pasar (Todaro & Smith, 2020). Jenis pengangguran yang terjadi akibat situasi tersebut dikenal dengan pengangguran struktural, dimana adanya struktur

ekonomi yang berubah berdampak pada munculnya ketidaksesuaian antara kemampuan (*skill*) pekerja dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara variabel-variabel pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran terbuka diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , Tingkat Pendidikan, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Teori Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang mengukur perbandingan mulai dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. Indeks ini digunakan sebagai indikator dalam menilai aspek kualitas pembangunan, mengklasifikasikan kondisi sebuah negara, serta mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM mengukur pencapaian rata-rata suatu negara atau wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia diantaranya umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak (UNDP, 2020). Ketiga dimensi ini diukur melalui indikator harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pendapatan per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dalam dimensi Kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Dalam teori Keynes, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi berpotensi dalam menurunkan Tingkat pengangguran melalui mekanisme peningkatan produktivitas yang mendorong permintaan agregat. Hal ini sejalan dengan konsep "*virtuous cycle*" yang menjelaskan bahwa pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi saling memperkuat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Keynes, dimana penelitian yang ditulis oleh (Andini & Zakiyyah, 2024) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki dampak negatif yang signifikan pada tingkat kemiskinan yang secara tidak langsung mengindikasikan hubungan negatif dengan pengangguran. Namun, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu diiringi oleh campur tangan pemerintah dalam meningkatkan permintaan agregat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Bella & Huda, 2023) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan. Hal ini menyatakan bahwa adanya kompleksitas hubungan yang memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui kebijakan ekonomi yang diatur oleh pemerintah.

Teori Tingkat Pendidikan

Teori Human Capital yang dikembangkan oleh Schultz (1961) dan Becker (1964) menekankan bahwa pendidikan merupakan investasi dalam modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas. Menurut teori ini, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih baik, sehingga lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan temuan (Psacharopoulos & Patrinos, 2018) yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, memberikan return yang tinggi dalam bentuk peningkatan *employability* dan pengurangan risiko pengangguran.

Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah penduduk usia produktif yakni 15-65 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK sendiri merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur seberapa besar penduduk usia produktif yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi biasanya akan menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran, karena lebih banyak individu yang aktif mencari pekerjaan. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi rendah, tingkat pengangguran

cenderung menurun karena sebagian orang tidak dianggap penganggur karena mereka tidak sedang mencari pekerjaan secara aktif (Mulyadi, 2016). Hal ini sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh (Widiantari et al., 2024) yang menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Penelitian lainnya yang ditulis oleh (Abdianti & Novera, 2024) menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wilayah Provinsi Sumatera berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan explanatory research, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat.

Objek penelitian ini mencakup 15 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, yang dipilih berdasarkan ketersediaan data yang konsisten dan lengkap selama periode tahun 2019 hingga 2024. Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya tingkat urbanisasi dan dinamika ketenagakerjaan yang kompleks, yang menjadikan wilayah ini relevan untuk dianalisis dalam konteks pengangguran terbuka dan pembangunan manusia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data panel (cross section dan time series) yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka yang telah dipublikasikan dan tidak melalui proses wawancara atau pengukuran langsung. Data yang digunakan mencakup indikator tahunan dari masing-masing kabupaten/kota terkait IPM, RLS, TPAK, dan TPT.

Data sekunder diperoleh dari dokumen statistik tahunan dan laporan resmi lainnya yang tersedia di situs resmi BPS dan publikasi daerah. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret hingga April 2025. Untuk memperoleh hasil yang valid dan akurat, seluruh data yang digunakan telah melalui proses verifikasi kesesuaian antar tahun dan antar wilayah.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam tahap awal dilakukan uji pemilihan model terbaik melalui uji Chow (untuk memilih antara model Common Effect dan Fixed Effect), serta uji Hausman (untuk memilih antara Fixed Effect dan Random Effect). Berdasarkan hasil uji tersebut, model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) karena memberikan hasil paling sesuai. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software statistik EViews versi terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Olah Data

Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh IPM, Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada 15 kab/kota di Provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui model yang terbaik antara ketiga model maka dilakukan 3 uji.

4.1.1 Pemilihan Model Terbaik

Uji yang pertama adalah uji chow, untuk mengetahui uji terbaik antara Common effect model dan fixed effect model. Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh IPM, Rata-rata Lama Sekolah, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada 15 kab/kota di Provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui model yang terbaik antara ketiga model maka dilakukan 3 uji.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.503078	(14,56)	0.0000
Cross-section Chi-square	84.336356	14	0.0000

Sumber : BPS Jawa Barat (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari uji Chow adalah sebesar $0,0000 < \text{taraf signifikan } 0,05$ artinya model fixed effect lebih baik daripada model common effect. Langkah selanjutnya adalah uji hausman untuk mengetahui model terbaik antara fixed effect model dan random effect model.

Tabel 2. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.454696	3	0.0375

Sumber: BPS Jawa Barat (data diolah)

Berdasarkan hasil output pada tabel 3, nilai Prob. sebesar $0.0375 (<0.05)$ maka model yang terpilih yaitu Fixed Effect (FEM). Apabila Nilai Prob < 0.05 maka tidak perlu lanjut ke Uji Lagrange Multiplier (LM Test). Karena sudah bisa dipastikan bahwa model yang terpilih yaitu Fixed Effect (FEM).

Tabel 3. Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.80956	7.727263	5.928303	0.0000
IPM	-0.001211	0.001251	-0.968238	0.3371
LS	-0.863308	0.884370	-0.976184	0.3332
TPA	-0.003176	0.000731	-4.347230	0.0001

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.820111	Mean dependent var	7.943378
Adjusted R-squared	0.765501	S.D. dependent var	2.411311
S.E. of regression	1.167679	Akaike info criterion	3.355687
Sum squared resid	76.35461	Schwarz criterion	3.916135
Log likelihood	-106.1604	Hannan-Quinn criter.	3.579257
F-statistic	15.01778	Durbin-Watson stat	1.597187
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: BPS Jawa Barat (data diolah)

4.1.2 Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dapat dianalisis melalui analisis koefisien determinasi (R Squared) dan Uji hipotesisi penelitian (uji F dan uji t).

1. Analisis koefisien determinasi

Berdasarkan output regresi random effect model pada tabel 3, pada kolom nilai R-square diperoleh nilai koefisien determinasi (R Squared) sebesar 0.820111, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pengaruh IPM, rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama terhadap variasi naik/turunnya tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 82,01% sedangkan sisanya sebesar 17,99% disebabkan oleh faktor lainnya diluar variabel.

2. Uji hipotesis : uji F (uji signifikansi koefisien regresi secara simultan)

Berdasarkan output regresi random effect model pada tabel 3, diketahui nilai F-Statistic sebesar 15.01778 dengan nilai Prob. (F-statistic) sebesar 0.0000 (<0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa Variabel Independen (IPM, LS, dan TPA) berpengaruh signifikan secara simultan (bersamaan) terhadap Variabel dependen (TPT).

3. Uji hipotesis : uji t (uji signifikansi koefisien regresi secara parsial)

Berdasarkan output regresi fixed effect model pada tabel 3, diperoleh nilai t hitung sebesar -0.968238 untuk variabel IPM, -0.976184 untuk variabel LS, -4.347230 untuk variabel TPA. Berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan t tabel diperoleh hasil :

- Variabel X1 memiliki nilai t-Statistic sebesar -0.968238 dengan nilai Prob. (Signifikansi) sebesar 0.3371 (>0.05) maka bisa disimpulkan Variabel X1(IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y.
- Variabel X2 memiliki nilai t-Statistic sebesar -0.976184 dengan nilai Prob. (Signifikansi) sebesar 0.3332 (>0.05) maka bisa disimpulkan Variabel X2(LS) tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y(TPT).
- Variabel X3 memiliki nilai t-Statistic sebesar -4.347230 dengan nilai Prob. (Signifikansi) sebesar 0.0001 (<0.05) maka bisa disimpulkan Variabel X3 (TPA) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y(TPT).

PEMBAHASAN

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 15 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat. Meskipun secara umum dan banyak teori yang mendukung bahwa Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi dianggap mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang baik, namun tidak selalu linier dengan tingkat penyerapan tenaga kerja, terutama jika struktur pasar kerja tidak mampu mengakomodasi tenaga kerja terdidik.

Kondisi di Jawa Barat, khususnya banyak daerah yang memiliki beragam pasar tenaga kerja, menunjukkan bahwa banyak lapangan kerja yang tersedia berada di sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil dan konveksi. Sektor ini biasanya tidak mensyaratkan pendidikan tinggi atau indikator Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, melainkan perusahaan lebih fokus pada keterampilan teknis dan kesiapan kerja individu. Dengan demikian, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia belum tentu dapat menurunkan TPT secara signifikan. Hal ini sejalan dengan Penelitian oleh Polii et al., (2023) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kota Tomohon. Selanjutnya didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2022) yang juga menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.

Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Rata-rata Lama Sekolah juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 15 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat. Secara teori, jika rata-rata lama sekolah semakin tinggi, maka sebanding dengan semakin tinggi pula keterampilan individu dalam memasuki pasar kerja. Namun, kondisi di Jawa Barat, banyak lulusan SMA/SMK atau bahkan perguruan tinggi yang mengalami *skill mismatch*, yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh individu dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Selain itu, terdapat beberapa kecenderungan individu yang terutama memiliki pendidikan tinggi merasa kurang percaya diri atau enggan melamar pada jenis pekerjaan di sektor manufaktur atau pekerjaan kasar karena dianggap tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Hal ini menyebabkan tingginya pengangguran terbuka justru terjadi pada kelompok berpendidikan menengah ke atas. Temuan ini konsisten dengan penelitian Desembriarto (2021), menyatakan bahwa Rata-rata Lama Sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul. Namun sangat berbanding terbalik dengan penelitian dari Septiya & Harsono (2025) yang justru menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB.

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan hasil yang signifikan, yang berarti bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencerminkan besarnya jumlah penduduk usia produktif yang aktif mencari pekerjaan. Pada ekonomi tenaga kerja, jika peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai akan menimbulkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di suatu wilayah, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan angka pengangguran terbuka.

Di Jawa Barat, dengan tingkat urbanisasi yang sangat pesat jika dibandingkan dengan provinsi lain dan juga tingginya pertumbuhan penduduk usia kerja dapat menambah tekanan pada pasar tenaga kerja. Hal ini terutama dialami oleh daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur industri yang memadai untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Penelitian dari Widiantri et al., (2025) juga menjelaskan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini juga sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah et al., (2023), yang menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2023.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 15 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara indikator pendidikan dan kondisi nyata pasar kerja. Sebaliknya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang mengindikasikan pentingnya keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja dalam mengatasi pengangguran terbuka di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024.

SARAN

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini terdapat beberapa masukan saran yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat diantaranya :

1. Pemerintah perlu melakukan adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap kurikulum pendidikan agar lebih selaras dengan kebutuhan pada pasar tenaga kerja. Salah satunya dengan memperkuat program pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan industri lokal yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah dapat mengimplementasikan program kemitraan yakni memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dengan dunia industri untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja industri. Salah satunya dengan mengadakan program magang pada beberapa perusahaan maupun instansi pemerintah.
3. Pemerintah perlu fokus dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi para angkatan kerja yang setiap tahunnya meningkat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), investasi infrastruktur, dan promosi investasi pada sektor-sektor padat karya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdianti, D., & Novera, M. (2024). *Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Sumatera Barat berbagai masalah mulai dari masalah ketenagakerjaan . Dimana keadaan ini dapat muncul*. 3(4).
- Andini, A., & Zakiyyah, N. A. A. (2024). Pengangguran Terbuka, PDRB, dan Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2022. *Journal Of International Taxation Accounting and Auditing*, 3(1), 64-79.
- An-Nur, U. I. (2024). *Keynesianisme: Teori Ekonomi Keynes, Permintaan Agregat, dan Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi*. Universitas Islam An Nur Lampung
- Andini, A., & Zakiyyah, N. A. A. (2024). PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, PDRB, DAN PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2022. *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 3(1), 64-79.
- Bella, P. C., & Huda, S. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 480-488.
- Desembriarto, D. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Lama Sekolah

terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul. *JURNAL RISET DAERAH*.

- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics* (10th ed.). Worth Publishers.
- Marliana, L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*.
- Mulyadi, M. (2016). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. *Badan Keahlian DPR RI: Kajian*, 21(3)
- Nasrullah, A., Al-Amin, A. I., Anandita, D., Sari, M., & Sayekti, S. (2023). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP PENGANGGURAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2023. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*.
- Polii, C. G., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Pratiwi, T. H., & Wijaya, R. S. (2024, July 2). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Terhadap TPAK di Kota Semarang. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 6, 582.
- Putra, B. R. W., & Faridatussalam, S. R. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Eks Karesidenan Surakarta Periode 2017-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7, 585.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics*, 26(5), 445-458.
- Raysharie, P. I., Apriliana, Takari, D., & Nasrida, M. f. (2023, April 2). Analisis Dampak Inflasi, PAD Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2014-2020. *MRI : Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1, 65.
- Septiya, I., & Harsono, I. (2025). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK, RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP PENGANGGURAN PROVINSI NTB. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier - Human Development and the Anthropocene*. United Nations Development Programme.
- Widiantari, I. A. A., Sahri, S., & Suriadi, I. (2025). PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, JUMLAH PENDUDUK, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENGANGGURAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*.